

*Jurnal Akuntansi Trisakti*  
Volume. 6 Nomor. 1 Februari 2019: 119-140  
Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v6i1.4975>

ISSN : 2339-0832 (Online)

## **PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI JAKARTA**

**Wahyuni Lestari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti  
Korespondensi: [yuniacc72@gmail.com](mailto:yuniacc72@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to explain that the application of PP No. 46 of 2013 to Small Medium Enterprise in Jakarta has been effective. This study uses primary data which obtained by distributing questionnaires and measured by using Likert Scale. The sample used in this study was Small Medium Enterprise in Jakarta especially West Jakarta, using convenience sampling method. The result of this study is the application of PP No. 46 of 2013 to Small Medium Enterprise in Jakarta with highly effective results are indicators of character deduction and/or collection, subject to VAT Tax, taxpayer obligations in the self assessment system, the depositing and reporting time. The indicators with effective results are tax subject, tax object and installment of WHT article 25. Meanwhile the indicators with less effective results are tariffs, compensation for losses and the timing of applying the PP No. 46 of 2013.*

**Keywords :** Application of PP No. 46 of 2013 ; Small Medium Enterprise.

*Submission date : 2019-07-18*

*Acceptance date : 2019-08-15*

---

## **PENDAHULUAN**

Sejak diterapkannya sistem perpajakan berdasarkan prinsip *self assessment* oleh pemerintah, maka peran pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara yang menopang APBN setiap tahun. Sistem ini masih terkendala pada kesulitan pemahaman akan pasal-pasal UU pajak tersebut beserta petunjuk pelaksanaannya, terutama bagi para pelaku UMKM. (Ompusunggu, 2011)

UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah memberikan wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini justru terselamatkan dengan maraknya dan menjamurnya UMKM di negara Indonesia. Apalagi sektor pajak di Indonesia sebagian besar juga bersumber dari sektor riil perekonomian, salah satunya adalah UMKM.

Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik wajib pajak UMKM. Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran

pajak. Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan UMKM (Indah H, dkk, 2015).

Dengan fenomena adanya kesulitan bagi UMKM untuk menghitung pajak terutang berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 14 ayat 2 UU Pph No. 36 Tahun 2008) ataupun Pph pasal 25, maka pemerintah saat ini menggali potensi pajak dari UMKM dengan mengeluarkan kebijakan perpajakan terbaru yaitu PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP No. 46 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 mengatur mengenai pengenaan Pph Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 1% bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penghasilan bruto sebulannya. Dengan kesederhanaan penghitungan pajak terutang ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat dan pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Terdapat pro dan kontra atas kebijakan Dirjen Pajak untuk menasar UMKM sebagai objek pajak. Kalangan UMKM, khususnya kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) umumnya merasa sangat berkeberatan untuk dijadikan sebagai wajib pajak. Mereka berkeberatan karena selama ini pemerintah dinilai tidak pernah melakukan apapun, baik pembinaan, pendampingan maupun permodalan kepada pelaku UMKM (Diamastuti, E, dkk, 2015).

Jika kita bandingkan PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No 36 tahun 2008 terdapat 3 hal yang sangat berbeda, yaitu dasar pengenaan pajak, tarif serta pelaporannya. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dasar pengenaan pajak untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sedangkan dasar pengenaan pajak pada PP No. 46 tahun 2013 adalah peredaran bruto usaha setiap bulan. Peredaran bruto adalah pendapatan kotor yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan tunai dan retur penjualan serta biaya-biaya. ([www.punditax.com](http://www.punditax.com))

Dengan adanya aturan seperti itu, maka suatu UMKM meskipun dalam keadaan rugi tetap tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar Pph Final 1% dari peredaran bruto usaha, sementara itu jika dengan UU Pph jika usaha mengalami kerugian, maka otomatis tidak akan ada Penghasilan Kena Pajak sehingga tidak akan ada Pph yang dapat dikenakan. Bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan dari penghasilan neto fiskal yang diperoleh maksimal 5 tahun ke depan baik untuk wajib pajak badan atau orang pribadi. ([www.punditax.com](http://www.punditax.com))

Di samping dasar pengenaan pajak, masih ada hal lain yang membedakan yaitu tarif pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Sedangkan menurut PP No. 46 Tahun 2013 tarif pajak penghasilannya yaitu 1% dari peredaran bruto usaha. Hal itu berarti terjadi penurunan tarif yang sangat besar yaitu sekitar 24%, tetapi nilai pajak penghasilan perusahaan akan tinggi karena penghitungan hanya dilakukan dari nilai peredaran bruto usaha.

Selain itu juga terjadi inkonsistensi terkait penamaan, karena kenyataannya pengenaan tarif 1% diterapkan terhadap peredaran bruto usaha (*gross revenue*) tetapi dinamakan sebagai pajak atas penghasilan (*taxable income*). Bukankah yang dikenai justru *revenue* bukan *income* ?

Jika ditinjau dari sudut tarif dan dasar pengenaan pajak, memang PP No. 46 Tahun 2013 sepintas terlihat sangat mudah dan menguntungkan bagi para pelaku UMKM, tetapi dari sudut pandang “*fairness*” PP No. 46 Tahun 2013 dianggap memiliki *spirit* yang kurang tepat dan memberatkan, karena setiap jenis bisnis memiliki *margin* yang jauh berbeda. Sebagai contoh, bisnis makanan saji memiliki *margin* sampai lebih dari 100%, sementara itu terkadang ada bisnis yang marginnya hanya 1% seperti bisnis pulsa. ([www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-PP-46-Tahun-2013](http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-PP-46-Tahun-2013))

Di samping dianggap memiliki *spirit* yang kurang tepat, PP No. 46 Tahun 2013 juga memberikan efek negatif (*disincentive*) terutama bagi pertumbuhan *start-up* di Indonesia. Alasan utamanya adalah karena banyak inovasi *start-up* yang bersifat sebagai jasa makelar, seperti Amazon dan e-bay (menghubungkan pembeli dan penjual barang) di mana jika dihitung secara omzet menjadi sangat besar, namun dengan *margin* kecil. ([www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-PP-46-Tahun-2013](http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-PP-46-Tahun-2013))

Akibatnya di lapangan, sejumlah wajib pajak yang telah menyadari hal ini cenderung menjadi *distrust* terhadap negara dan mereka memilih untuk memanipulasi nilai peredaran bruto usahanya dengan alasan ketidakadilan sebagai rasionalisasinya. Sementara itu, negarapun sulit untuk membuktikan tingkat kebenaran materi pelaporan wajib pajak karena pada kenyataannya kebijakan ini belum memiliki alat kontrol yang kuat untuk menguji besaran peredaran bruto usaha setiap wajib pajak. ([www.punditax.com](http://www.punditax.com))

Oleh karena banyaknya pro dan kontra terhadap PP No. 46 Tahun 2013, maka penulis merasa tertarik untuk menjelaskan bahwa jika penerapan PP No. 46 Tahun 2013 telah berjalan secara efektif, maka PP No. 46 Tahun 2013 justru akan menguntungkan bukan hanya bagi Ditjen Pajak tetapi juga bagi para pelaku UMKM di Indonesia, khususnya UMKM di Jakarta. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM di Jakarta**”

Tujuan dari paper ini diharapkan agar semua pelaku UMKM di Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar pajak, terutama sekali karena adanya kemudahan peraturan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 serta pelaku UMKM bersedia menerapkan semua aturan yang telah ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dengan baik dan benar.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori ini disusun dengan menggunakan asumsi dasar bahwa manusia akan berperilaku sesuai dengan segala informasi yang telah diserapnya dan bertindak secara sadar (Ajzen, 2012). Jadi manusia dapat berperilaku atau bertindak sesuatu itu tergantung

pada niat yang mendorong dalam dirinya, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol keperilakuan.

Dalam penelitian ini responden akan diberi gambaran mengenai perilaku dan diberi serangkaian pernyataan. Respon ini digunakan untuk mengkonstruksi daftar modal *accessible beliefs*, yaitu daftar *beliefs* yang paling umum dipegang oleh populasi. Modal *accessible beliefs* ini akan digunakan untuk mengkonstruksi kuesioner standar yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan literatur tentang *Theory of Planned Behavior* tersebut, dapat dijelaskan tentang niat dari wajib pajak khususnya para pelaku UMKM untuk mau menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut. Dengan adanya *Self-Assessment System*, wajib pajak mempunyai kekuasaan penuh terhadap kewajiban pajaknya, sehingga niat untuk menerapkan suatu peraturan pajak sangat diharapkan, demikian pula niat dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajak. Jika suatu peraturan pajak telah diterapkan oleh semua Wajib Pajak, maka suatu peraturan pajak baru bisa dikatakan telah diterapkan secara efektif.

Menurut Putri,dkk (2014), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Penerapan *presumptive regime-turnover based single rate* dalam PP No. 46 Tahun 2013 mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa *peningkatan voluntary compliance*. Jika para pelaku UMKM sudah *voluntary compliance*, maka otomatis kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara akan meningkat. Hal tersebut berarti bahwa maksud pemerintah untuk menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 telah tercapai.

## Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

### Definisi

Definisi penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM sesuai ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang bersifat final dan dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan Pph ini dituangkan dalam PP No. 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-42/PJ/2013.

### Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2a terdiri dari : Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap)

### Tarif PP No. 46 Tahun 2013

Tarif PP No. 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 adalah 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.

Pph Terutang = 1% x Peredaran Bruto setiap bulan

### **Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013**

Yang menjadi objek pajak PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2b adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

### **Sifat Pemotongan dan atau Pemungutan PP No. 46 Tahun 2013**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 32/PJ/2013 pasal 1 ayat 1, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

### **Subjek PPN (Batasan Pengusaha Kecil PPN)**

Menurut PMK 197/PMK.03/2013 yang mulai berlaku 1 Januari 2014 sebagai perubahan atas PMK 68/PMK.03/2010, batasan pengusaha kecil PPN disesuaikan dari jumlah peredaran bruto per tahun Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Perubahan tersebut dilakukan agar sesuai dengan batasan UMKM dalam PP No. 46 Tahun 2013.

Oleh karena adanya aturan tersebut maka pelaku UMKM dengan peredaran bruto per tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tidak berkewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga pelaku UMKM tidak perlu memungut, menyetor dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang setiap bulannya.

### **Kewajiban WP dalam Sistem *Self Assessment***

Kewajiban Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Oleh karena itu menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat 1 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Sementara itu jika pelaku UMKM menerapkan PP No. 46 Tahun 2013, maka para pelaku UMKM boleh memilih untuk hanya melakukan pencatatan saja, karena dalam PP No. 46 Tahun 2013 tidak ada aturan sama sekali mengenai kewajiban menyelenggarakan pembukuan.

### **Saat Penyetoran PP No. 46 Tahun 2013**

Penyetoran Pph Pasal 4(2) bagi pelaku UMKM yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 diatur lebih lanjut dengan PMK No. 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 1 yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Saat penyetoran Pph Pasal 4(2) tersebut sama dengan aturan UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 yaitu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

### **Saat Pelaporan PP No. 46 Tahun 2013**

Pelaporan Pph Pasal 4(2) bagi pelaku UMKM yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 diatur lebih lanjut dengan PMK No. 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 3

yaitu dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Ketentuan mengenai pelaporan SPT Masa Pph diberlakukan mulai masa pajak Januari 2014. Sedangkan pelaporan SPT Masa Pph masa Juli-Desember 2013 mengikuti aturan dalam PMK No. 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 2 yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

### **Kompensasi Kerugian PP No. 46 Tahun 2013**

Menurut PP No. 46 Tahun 2013 pasal 8c, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian pada suatu tahun pajak tersebut tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya. Hal tersebut berarti bahwa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut seperti yang berlaku selama ini menurut UU Pph No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 menjadi tidak berlaku lagi.

Kerugian pada bulan Januari-Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai Pph Final pada tahun pajak berikutnya. Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian tersebut wajib melampirkan laporan laba rugi bulan Januari-Juni 2013 dalam SPT Tahunan Pph Tahun 2013.

### **Angsuran Masa Pph Pasal 25 PP No. 46 Tahun 2013**

Menurut PMK No. 107/PMK.011/2013 pasal 9 ayat 1, Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 UU Pph No. 36 Tahun 2008. Bagi Wajib Pajak yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 setoran bulannya berupa Pph Pasal 4(2) dan bukan Pph Pasal 25.

### **Saat Mulai Berlakunya PP No. 46 Tahun 2013**

PP No. 46 Tahun 2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Presiden RI dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013.

## **UMKM**

### **Kriteria UMKM**

Menurut UU No 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dapat dibagi berdasarkan kriteria asset dan omsetnya. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang dibagi berdasarkan asset yaitu :

1. Asset usaha kurang dari atau sama dengan 50 juta rupiah per tahun di sebut usaha mikro.
2. Asset usaha lebih dari 50 juta tetapi kurang dari 500 juta rupiah per tahun di sebut usaha kecil.
3. Asset usaha lebih dari 500 juta tetapi kurang dari 10 miliar rupiah per tahun di sebut usaha menengah.

Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang dibagi berdasarkan omset yaitu :

1. Omset usaha kurang dari atau sama dengan 300 juta rupiah per tahun di sebut usaha mikro.
2. Omset usaha lebih dari 300 juta tetapi kurang dari 2,5 miliar rupiah per tahun di sebut usaha kecil.
3. Omset usaha lebih dari 2,5 miliar tetapi kurang dari 50 miliar rupiah per tahun di sebut usaha menengah.

**Tabel 1**  
**Kriteria UMKM**

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

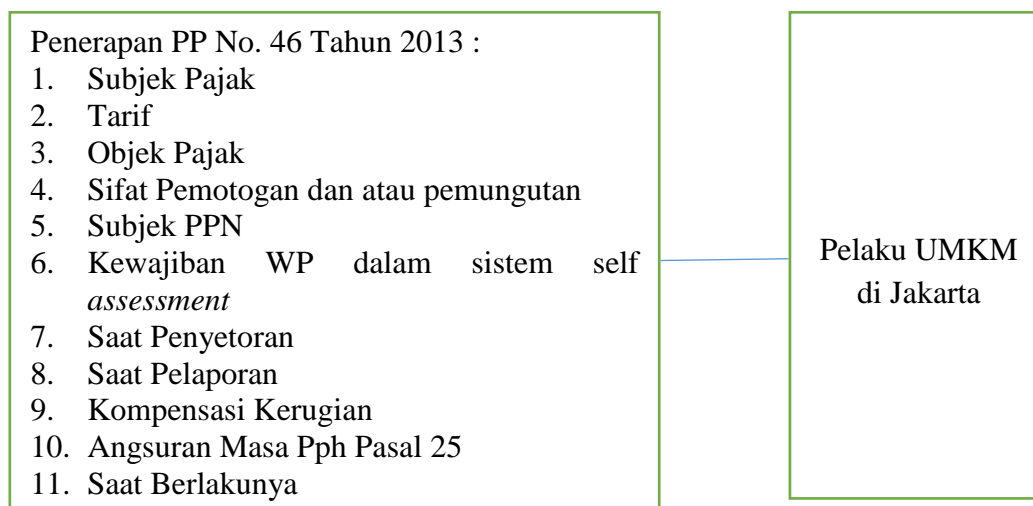
Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

## PENELITIAN TERDAHULU

Menurut hasil penelitian Wahdi,dkk (2018), PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Semarang telah diterapkan secara efektif, hal tersebut terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak. Adhayani, dkk (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sementara Bayu, dkk (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa KPP Pratama Jakarta Jatinegara telah efektif dalam melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013. Persentase efektivitas yang diperoleh selama tahun 2012-2014 menunjukkan angka lebih dari 90%. Hal tersebut terlihat dari adanya kontribusi bagi penerimaan pajak, meningkatnya jumlah wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

## KERANGKA PEMIKIRAN



## **Gambar 1** **Model Penelitian**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Rancangan Penelitian**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan metoda penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dilakukan untuk memastikan dan mampu menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel yang menarik dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang menarik dari perspektif individu, organisasi, industri atau lainnya. (Sekaran, 2016)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuesioner kepada responden dengan teknik yang digunakan adalah *convenience sampling*. Metoda ini merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan dijumpai menurut keinginan peneliti. Metoda ini merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cara yang cepat dan efisien. (Sekaran, 2016). Kuesioner yang terkumpul nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis yang dilakukan.

Dimensi waktu dalam penelitian ini adalah studi satu tahap (*one shot study*) yaitu studi yang menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap atau sekaligus. Periode penyebaran kuesioner dilakukan selama satu minggu yaitu bulan Juli 2018. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan apakah PP No. 46 Tahun 2013 telah diterapkan pada para pelaku UMKM di Jakarta secara efektif.

#### **Populasi dan Sampel Data**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang berada di Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan para pelaku UMKM yang berada di Jakarta, khususnya Jakarta Barat.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner pada pelaku UMKM yang peneliti kenal, baik dengan bertemu langsung maupun melalui media *whatsapp*.

#### **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data dari sumber asli untuk tujuan spesifik penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama berisi hal-hal yang bersifat umum seperti identitas responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan responden, dan bagian kedua yaitu inti kuesioner yang berhubungan dengan Penerapan PP No. 46 tahun 2013 yang berisi 11 (sebelas) pernyataan.

Dalam pemberian jawaban responden cukup memberikan tanda silang pada kolom yang dipilih apakah 1. STE (Sangat Tidak Efektif), 2. TE (Tidak Efektif), 3. KE (Kurang Efektif), 4. E (Efektif) dan SE (Sangat Efektif). Peneliti lalu melakukan penyeleksian terlebih dahulu pada kuesioner yang telah diisi oleh responden dan



merekapnya di excel. Selanjutnya peneliti akan memberikan skor pada tiap kolom butir pernyataan yang disediakan, yaitu *5 point likert scale* di mana : 1 : Sangat Tidak Efektif, 2 : Tidak Efektif, 3 : Kurang Efektif, 4 : Efektif dan 5 : Sangat Efektif. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data atas kuesioner yang telah direkap tersebut, dengan terlebih dahulu melakukan pengujian analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para pelaku UMKM yang berada di Jakarta Barat dalam jangka waktu antara tanggal 16 Juli - 22 Juli 2018. Adapun distribusi penyebaran kuesioner tersebut seperti yang bisa kita lihat pada tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Distribusi Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	75	100 %
Kuesioner kembali & dapat digunakan	40	53,33%

Sumber : Data penelitian primer dari 16-22 Juli 2018

Pada tabel 2 Distribusi Kuesioner di atas terlihat bahwa dari 70 kuesioner yang telah disebar hanya sebanyak 40 kuesioner (53,33%) yang kembali dengan data yang terisi dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	7	17,50%
>= 30 tahun-50 tahun	23	57,50%
>= 50 tahun	10	25,00%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah

Pada tabel 3 Karakteristik Responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden yang berusia di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang atau 17,5 %, responden yang berusia lebih dari atau sama dengan 30 tahun serta kurang dari 50 tahun sebanyak 23 orang atau 57,5%, sedangkan responden yang berusia sama dengan atau lebih dari 50 tahun sebanyak 10 responden atau 25%.

**Tabel 4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Usia	Jumlah	Persentase
Pria	22	55%
Wanita	18	45%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah

Pada tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di atas terlihat bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 22 responden atau sebesar 55% dan responden yang berjenis kelamin wanita adalah sebanyak 18 responden atau sebesar 45%.

**Tabel 5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Usia	Jumlah	Persentase
D3	4	10,00%
S1	21	52,50%
S2	2	5,00%
S3	0	0,00%
Lainnya	13	32,50%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan D3 sebanyak 4 orang atau 10 %, S1 sebanyak 21 orang atau 52,5%, S2 sebanyak 2 orang atau 5 %, S3 sebanyak 0 orang atau 0 % dan lainnya sebanyak 13 orang atau 32,5 %.

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Makanan	11	27,5%
Garmen	5	12,5%
Jasa	7	17,5%
Lainnya	17	42,5%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah

Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha menunjukkan bahwa responden yang memiliki usaha dagang makanan ssebanyak 11 orang atau 27,5 %, garmen sebanyak 5 orang atau 12,5 %, jasa sebanyak 7 orang atau 17,5 %, dan lainnya sebanyak 17 orang atau 42,5 %.

**Tabel 7**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Peredaran Bruto / Omset Per Tahun**

Keterangan	Jumlah	Persentase
< 300.000.000	26	65 %
>= 300.000.000-2.500.000.000	12	30 %
>=2.500.000.000-4.800.000.000	2	5 %
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah

Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Peredaran Bruto/Omset Per Tahun menunjukkan bahwa responden yang memiliki peredaran bruto/omset per tahun < 300.000.000 (kurang dari tiga ratus juta rupiah) sebanyak 26 orang atau 65 %, peredaran bruto/omset per tahun >=300.000.000-2.500.000.000 (lebih besar atau sama dengan tiga ratus juta sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 12 orang atau 30 % dan peredaran bruto/omset per tahun > = 2.500.000.000-4.800.000.000 (lebih besar atau sama dengan dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan empat milyar delapan ratus juta rupiah) sebanyak 2 orang atau 5 %.

### Analisis Data

Analisis statistik deskriptif data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, dan dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Untuk mempermudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden.

Adapun cara mencari nilai rata-rata adalah dengan membuat interval, dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebanyak kategori sesuai banyaknya opsi jawaban pada setiap pernyataan. Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2005) adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}}$$

P = Panjang kelas interval  
 Rentang = Skor tertinggi (5) - Skor terendah (1)  
 Banyak Kelas Interval = 5

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah:

$$P = \frac{5-1}{5} = 0.80$$

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Sangat Tidak Efektif/Sangat Tdk Memadai = 1,00-1,80  
 Tidak Efektif/Tidak Memadai = 1,81-2,61  
 Kurang Efektif/Kurang Memadai = 2,62-3,42  
 Efektif/ Memadai = 3,43-4,23  
 Sangat Efektif/Sangat Memadai = 4,24-5,00

### Statistik Deskriptif

**Tabel 8**

<b>Statistik Deskriptif</b>					
<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	40	2,00	5,00	4,2000	,68687
P2	40	1,00	5,00	2,8000	1,30482
P3	40	1,00	5,00	3,8500	,80224
P4	40	2,00	5,00	4,3250	,65584
P5	40	3,00	5,00	4,5000	,59914
P6	40	3,00	5,00	4,4250	,71208
P7	40	3,00	5,00	4,3500	,62224
P8	40	2,00	5,00	4,4000	,81019
P9	40	1,00	5,00	2,6500	1,47718
P10	40	1,00	5,00	4,2000	,85335
P11	40	1,00	5,00	2,7500	1,23517
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS 23

Tabel 8 Statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum jawaban responden, nilai maksimum jawaban responden, nilai *mean* jawaban responden dan standar deviasi jawaban responden dari masing-masing indikator yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

### **Tanggapan Responden Mengenai Variabel Penerapan PP No. 46 Tahun 2013**

Variabel Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM sesuai ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang bersifat final dan dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak.

Variabel Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terdiri dari 11 indikator dan masing-masing indikator terdiri dari satu butir pernyataan. Adapun kesebelas indikator tersebut terdiri dari subjek pajak, tarif, objek pajak, sifat pemotongan dan atau pemungutan, subjek PPN, kewajiban wajib pajak dalam sistem *self assessment*, saat penyeteroran, saat pelaporan, kompensasi kerugian, angsuran Pph Pasal 25 serta saat berlakunya.

Kesebelas indikator tersebut akan mempengaruhi efektivitas Penerapan PP No 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 40 responden yang merupakan pelaku UMKM di Jakarta

**Tabel 9**  
**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai 11 indikator Penerapan PP No. 46 Tahun 2013**

No	Pernyataan		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Rata-Rata
			STE	TE	KE	E	SE				
1	Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013 adalah WPOP atau WP badan tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap) Tarif PP No. 46 Tahun 2013 yaitu 1 %	F	0	2	0	26	12	168	200	84%	4,20
		%	0,00%	5,00%	0,00%	65,00%	30,00%				
2	Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013 adalah total peredaran bruto dari usaha/omset, termasuk dari usaha cabang yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000	F	11	3	11	13	2	112	200	56%	2,80
		%	27,50%	7,50%	27,50%	32,50%	5,00%				
3	Sifat pemotongan dan atau pemungutan PP No. 46 Tahun 2013 adalah final.	F	1	1	7	25	6	154	200	77%	3,85
		%	2,50%	2,50%	17,50%	62,50%	15,00%				
4	Subjek PPN menurut PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak boleh memilih untuk menjadi wajib pajak non PKP	F	0	1	1	22	16	173	200	87%	4,33
		%	0,00%	2,50%	2,50%	55,00%	40,00%				
5	Kewajiban wajib pajak dalam sistem <i>self assessment</i> menurut PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang cukup	F	0	0	2	16	22	180	200	90%	4,50
		%	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	55,00%				
6		F	0	0	5	13	22	177	200	89%	4,43
		%	0,00%	0,00%	12,50%	32,50%	55,00%				

	hanya melakukan pencatatan.											
	Penyetoran Pph Pasal 4(2) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir SSP yang sudah mendapat validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu lapor SPT Masa Pph Pasal 4(2) Wajib Pajak yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 dan mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya Wajib Pajak yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pph Pasal 25 UU Pph PP No. 46	F	0	0	3	20	17					
7		%	0,00%	0,00%	7,50%	50,00%	42,50%	174	200	87%	4,35	
		F	0	2	2	14	22					
8		%	0,00%	5,00%	5,00%	35,00%	55,00%	176	200	88%	4,40	
		F	15	3	7	11	4					
9		%	37,50%	7,50%	17,50%	27,50%	10,00%	106	200	53%	2,65	
		F	1	1	2	21	15					
10		%	2,50%	2,50%	5,00%	52,50%	37,50%	168	200	84%	4,20	
11		F	9	8	8	14	1	110	200	55%	2,75	

Tahun 2013 ini mulai berlaku dan diterapkan sejak tanggal 1 Juli 2013	%	22,50 %	20,00 %	20,00 %	35,00 %	2,50 %			
							Total Skor	1698	2200
							Kategori	Efektif	77% 3,86

Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah

Tabel 8 Distribusi Tanggapan Responden Mengenai 11 Indikator Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di atas menunjukkan bahwa Penerapan PP No. 46 berada dalam kategori efektif dengan rata-rata bobot 3,86. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Pelaku UMKM di Jakarta telah berjalan secara efektif sebesar 77%.

**Tabel 10**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Penerapan PP No. 46**  
**Tahun 2013 pada Pelaku UMKM di Jakarta.**

No	Indikator	Total Skor Aktual	Total Skor Ideal	(%)	Rata-Rata	Kategori
1	Subjek Pajak	168	200	84%	4,20	Efektif
2	Tarif	112	200	56%	2,80	Kurang Efektif
3	Objek pajak	154	200	77%	3,85	Efektif
4	Sifat pemotongan dan atau pemungutan	173	200	87%	4,33	Sangat Efektif
5	Subjek Pajak PPN	180	200	90%	4,50	Sangat Efektif
6	Kewajiban WP dalam sistem <i>self assessment</i>	177	200	89%	4,43	Sangat Efektif
7	Saat Penyetoran	174	200	87%	4,35	Sangat Efektif
8	Saat Pelaporan	176	200	88%	4,40	Sangat Efektif
9	Kompensasi Kerugian	106	200	53%	2,65	Kurang Efektif

10	Angsuran Masa Pph Pasal 25	168	200	84%	4,20	Efektif
11	Saat Berlakunya	110	200	55%	2,75	Kurang Efektif
<b>Total Skor Kategori</b>		<b>1698</b>	<b>2200</b>	<b>77%</b>	<b>3,86</b>	<b>Efektif</b>

---

Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah

Tabel 9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Pelaku UMKM di Jakarta dapat dikatakan efektif / tinggi karena nilai persentase aktualnya mencapai 77%, hal ini tercermin dari 11 indikator terdapat 5 indikator yang dijawab sangat efektif oleh responden, yaitu indikator sifat pemotongan dan atau pemungutan, subjek pajak PPN, kewajiban WP dalam sistem *self assessment*, saat penyeteroran dan saat pelaporan.

Sementara itu terdapat 3 indikator yang dijawab efektif oleh responden yaitu indikator subjek pajak, objek pajak dan angsuran Masa Pph Pasal 25, sedangkan sisanya sebanyak 3 indikator yang dijawab oleh responden kurang efektif yaitu indikator tarif, kompensasi kerugian dan saat berlakunya.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Untuk menjelaskan tanggapan responden tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Pelaku UMKM di Jakarta, maka penulis telah melakukan analisis statistik deskriptif. Dari 11 indikator disusunlah 11 pernyataan mengenai penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di Jakarta, diperoleh skor aktual 1.698 dan skor ideal 2.200 dengan nilai persentase 77% dengan nilai rata-rata 3,86 sehingga hasil penelitian termasuk dalam kategori efektif. Dengan demikian berarti bahwa PP No. 46 Tahun 2013 telah diterapkan secara efektif, dan hal tersebut berarti bahwa hipotesis penelitian diterima.

### **Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Kurang Efektif**

**Tabel 11**  
**Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Kurang Efektif**



No	Pernyataan		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Rata-Rata
			STE	TE	KE	E	SE				
2	Tarif PP No. 46 Tahun 2013	F	11	3	11	13	2	112	200	56%	2,80
	yaitu 1 %	%	27,5 %	7,50 %	27,50 %	32,50 %	5,00%				
9	Wajib Pajak yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 dan mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya	F	15	3	7	11	4	106	200	53%	2,65
	PP No. 46 Tahun 2013 ini mulai berlaku dan diterapkan sejak tanggal 1 Juli 2013	%	37,50 %	7,50 %	17,50 %	27,50 %	10,00 %				
11		F	9	8	8	14	1	110	200	55%	2,75
		%	22,50 %	20,00 %	20,00 %	35,00 %	2,50%				
Total Skor								328	600		
Kategori								Kurang Efektif		55%	2,73

Berdasarkan tabel 10 Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Kurang Efektif dari para responden, maka terdapat 3 pernyataan yang dijawab oleh para responden dengan hasil kurang efektif yaitu dengan nilai rata-rata 2,73 atau 55 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 dari 11 pernyataan yang mendapat jawaban kurang efektif dari para responden, artinya para responden kurang setuju dengan 3 kebijakan yang terkait dengan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Para Pelaku UMKM di Jakarta. Adapun ketiga kebijakan tersebut adalah kebijakan mengenai tarif, kompensasi kerugian dan saat berlakunya.

### Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Efektif

**Tabel 12**  
**Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Efektif**

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden					Skor	Skor	(%)	Rata-
----	------------	------------------------	--	--	--	--	------	------	-----	-------

			STE	TE	KE	E	SE	Aktu al	Ideal		Rata
1	Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013 adalah WPOP atau WP badan tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap)	F	0	2	0	26	12				
		%	0,00 %	5,00 %	0,00 %	65,00 %	30,00 %	168	200	84%	4,20
3	Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013 adalah total peredaran bruto dari usaha/omset, termasuk dari usaha cabang yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000	F	1	1	7	25	6				
		%	2,50 %	2,50 %	17,50 %	62,50 %	15,00 %	154	200	77%	3,85
10	Wajib Pajak yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pph Pasal 25 UU Pph	F	1	1	2	21	15				
		%	2,50 %	2,50 %	5,00 %	52,50 %	37,50 %	168	200	84%	4,20
Total Skor								490	600		
Kategori								Efektif		82%	4,08

Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 11 Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Efektif dari para responden, maka terdapat 3 pernyataan yang dijawab oleh para responden dengan hasil efektif yaitu dengan nilai rata-rata 4,08 atau 82 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 dari 11 pernyataan yang mendapat jawaban efektif dari para responden, artinya para responden setuju dengan 3 kebijakan yang terkait dengan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Para Pelaku UMKM di Jakarta. Adapun ketiga kebijakan tersebut adalah kebijakan mengenai subjek pajak, objek pajak dan angsuran masa Pph Pasal 25.

### Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Sangat Efektif

**Tabel 13**  
**Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Sangat Efektif**

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden						Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Rata - Rata
		STE	TE	KE	E	SE					
4	Sifat pemotongan dan atau pemungutan PP No. 46 Tahun 2013 adalah final.	F	0	1	1	22	16	173	200	87%	4,33
	%	0,00 %	2,50 %	2,50 %	55,00 %	40,00 %					
5	Subjek PPN menurut PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak boleh memilih untuk menjadi wajib pajak non PKP	F	0	0	2	16	22	180	200	90%	4,50
	%	0,00 %	0,00 %	5,00 %	40,00 %	55,00 %					
6	Kewajiban wajib pajak dalam sistem <i>self assessment</i> menurut PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang cukup hanya melakukan pencatatan.	F	0	0	5	13	22	177	200	89%	4,43
	%	0,00%	0,00 %	12,50 %	32,50 %	55,00 %					
7	Penyetoran Pph Pasal 4(2) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir SSP yang sudah mendapat validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu lapor SPT Masa Pph Pasal 4(2)	F	0	0	3	20	17	174	200	87%	4,35
	%	0,00 %	0,00 %	7,50 %	50,00 %	42,50 %					
8	Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu lapor SPT Masa Pph Pasal 4(2)	F	0	2	2	14	22	176	200	88%	4,40
	%	0,00 %	5,00 %	5,00 %	35,00 %	55,00 %					
Total Skor								880	1000	88%	4,40
Kategori								Sangat Efektif			

Berdasarkan tabel 12 Pernyataan Responden Yang Mendapat Jawaban Sangat Efektif dari para responden, maka terdapat 5 pernyataan yang dijawab oleh para responden dengan hasil sangat efektif yaitu dengan nilai rata-rata 4,4 atau 88 %. Hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 5 dari 11 pernyataan yang mendapat jawaban sangat efektif dari para responden, artinya para responden sangat setuju dengan 5 kebijakan yang terkait dengan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Para Pelaku UMKM di Jakarta. Adapun kelima kebijakan tersebut adalah kebijakan mengenai sifat pemotongan dan atau pemungutan, subjek pajak PPN, kewajiban wajib pajak dalam sistem *self assessment*, saat penyetoran dan saat pelaporan.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM di Jakarta”, adapun simpulan yang dapat diambil adalah : Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Jakarta secara parsial atau per indikator dengan hasil yang sangat efektif adalah indikator sifat pemotongan dan atau pemungutan, subjek pajak PPN, kewajiban WP dalam sistem *self assessment*, saat penyetoran dan saat pelaporan. Hasil yang dicapai untuk kelima indikator tersebut adalah 4,4 atau 88%. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Jakarta secara parsial atau per indikator dengan hasil yang efektif adalah indikator subjek pajak, objek pajak dan angsuran Masa Pph Pasal 25. Hasil yang dicapai untuk ketiga indikator tersebut adalah sebesar 4,08 atau 82%. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Jakarta secara parsial atau per indikator dengan hasil yang kurang efektif adalah indikator tarif, kompensasi kerugian dan saat berlakunya. Hasil yang dicapai untuk ketiga indikator tersebut adalah sebesar 2,73 atau 55%.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, peneliti melihat dan merasakan adanya beberapa keterbatasan yang perlu untuk diperbaiki, yaitu :

1. Kurangnya referensi yang membahas tentang efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013.
2. Penelitian sebelumnya tidak mempublikasikan kuesioner mengenai indikator efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013, sehingga peneliti membuat kuesioner dengan berdasarkan pada isi PP No. 46 Tahun 2013 beserta semua aturan pelaksanaannya.
3. Kurangnya pemahaman responden mengenai aturan perpajakan, khususnya aturan pajak mengenai PP No. 46 Tahun 2013, sehingga ada kemungkinan jawaban responden menjadi kurang tepat.
4. Sebagian responden yang diminta untuk mengisi kuesioner merasa khawatir jika harus mengisi kuesioner yang berkaitan dengan topik pajak.

### **Implikasi**

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris bahwa PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Jakarta telah diterapkan secara efektif, oleh karena itu implikasi yang dapat diberikan, di antaranya :

1. Para pelaku UMKM setelah lebih memahami aturan perpajakan, khususnya PP No. 46 Tahun 2013 beserta semua aturan pelaksanaannya, maka mereka menjadi :
  - Lebih patuh terhadap aturan perpajakan
  - Lebih melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar

- Beralih dari usaha informal menuju usaha formal, sehingga akan memudahkan mereka untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan
- 2. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih memahami keinginan para pelaku UMKM yang berkaitan dengan pajak, sehingga untuk masa berikutnya agar lebih bisa mengakomodir keinginan para pelaku UMKM terutama sekali untuk aspek keadilan sebelum menerbitkan aturan pajak yang menyangkut pelaku UMKM.
- 3. Dampak positif dari hal tersebut tentu saja akan meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
- 4. Direktorat Jenderal Pajak bisa lebih mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang diberlakukan dalam PP No. 46 Tahun 2013.

### Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk :

- 1. Menambah jangka waktu untuk melakukan penyebaran kuesioner
- 2. Menyebarkan kuesioner di semua pusat bisnis di Jakarta.
- 3. Menambah referensi aturan perpajakan yang terbaru terkait dengan UMKM yaitu PP No. 23 Tahun 2018.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhayani, M., & Kusumah, R. W. (2015). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 1(1), 35–56.
- Ajzen, I., Albarracin, D., & Hornik, R. (Eds.). (2012). *Prediction and Change of Health Behavior: Applying the Reasoned Action Approach*. Psychology Press.
- Caroko, B., Susilo, H., & A, Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Catatan Kritis Atas PP. No. 46 Tahun 2013 : Sebuah Usulan Konstruktif. (2016). Retrieved from [www.punditax.com](http://www.punditax.com)
- Diamastuti, E., & Prastiwi, D. (2015). Perilaku Mitra Binaan dalam Menyikapi Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Mitra Binaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk). In *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper* (pp. 440–452).
- Kharisma, R., Anggraini, R. . R., & Arundhati, G. (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Universitas Jember.
- Mutia, Sri, P. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Negeri Padang.
- Ompusunggu, A. P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 Tahun 2013. (2013). Retrieved September 28, 2013, from [www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013](http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013)
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (John Wiley).
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika* (Tarsito, 1). Bandung.

Wahdi, N., Suratman, & Agnesia, C. (2017). Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper* (pp. 9–20). Semarang.

[www.pajak.go.id/article/polemik-pajak-atas-umkm](http://www.pajak.go.id/article/polemik-pajak-atas-umkm). Polemik Pajak Atas UMKM. 19 April 2018

[www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013](http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013) Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 Tahun 2013. 28 September 2013

[www.punditax.com](http://www.punditax.com) Catatan Kritis Atas PP. No. 46 Tahun 2013 : Sebuah Usulan Konstruktif. 4 Oktober 2016